

**PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DI
KELURAHAN KRANGGAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2020**

Vega Aprinda Lolita

NPP 30. 0726

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: aprindav@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof Dr. Nurliah Nurdin, S.SOS, M.A

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The ethnic Chinese in Kranggan Village prefer to trade on voting day, some choose to take part in the election first and then open their shop Back. Of the 5 RWs spread across Kranggan Village, only 1 RW has an indigenous population, while the other 4 RWs are mostly Chinese, this is what makes the difference in the level of participation in each RW in Kranggan Village.*

Purpose: *The purpose of this study was to determine the level of participation of the Chinese Ethnic in the Kranggan Village in the Regional Head Election, the inhibiting factors in increasing the participation of the Chinese Ethnic, efforts to overcome obstacles carried out by the General Election Commission of Semarang City, Central Java Province.*

Method: *This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques used interviews and documentation, and did not use the observation method because the research carried out had already been completed, namely in 2020.*

Results/Findings: *The findings obtained by the authors in this study are 1. The awareness of the Chinese community is still lacking, namely they are reluctant to use their right to vote in regional head elections because there is no interest in political activities 2) many Chinese people do not care about election activities and prioritize themselves to work, but during the election of candidates for DPRD members, the political participation rate increased because there were candidates who came forward who came from ethnic Chinese. 3), the number of Chinese citizens who attended the socialization and participated in the campaign stages was very limited.*

Conclusion: *the participation of the Chinese Ethnic in Kranggan Village will not go well if the socialization from the KPU is not evenly distributed, so that other inhibiting factors will not be resolved if the problem regarding the level of participation is not going well*

Keywords: *Ethnicity, Election Commission, Participation, Outreach*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Etnis Tionghoa yang berada di Kelurahan Kranggan lebih memilih untuk berdagang saat hari h pemungutan suara, ada juga yang memilih untuk mengikuti pemilu dulu baru kemudian membuka tokonya Kembali Dari 5 RW yang tersebar di Kelurahan Kranggan hanya 1 RW saja yang berpenduduk pribumi, sedangkan 4 RW lainnya mayoritas berisi warga Etnis Tionghoa, hal ini yang membuat adanya perbedaan tingkat partisipasi di tiap RW yang berada di Kelurahan Kranggan **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui tingkat partisipasi Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam Pemilihan Kepala Daerah, faktor penghambat dalam peningkatan partisipasi Etnis Tionghoa, upaya mengatasi hambatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta tidak menggunakan metode observasi dikarenakan penelitian yang dilakukan sudah terlewat yaitu di Tahun 2020. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1. Kesadaran masyarakat Tionghoa masih kurang yaitu enggan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala daerah karena tidak adanya ketertarikan dengan kegiatan politik 2) masyarakat Tionghoa banyak yang tidak peduli dengan kegiatan pemilihan dan lebih mengutamakan dirinya untuk bekerja, tetapi saat pemilihan calon anggota DPRD angka partisipasi politik meningkat karena adanya calon tersebut yang maju yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa 3) , jumlah warga Tionghoa yang hadir dalam sosialisasi dan mengikuti tahapan kampanye sangat terbatas **Kesimpulan:** partisipasi Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan tidak akan berjalan dengan baik apabila sosialisasi dari KPU tidak merata, sehingga factor-faktor penghambat lainnya tidak akan teratasi apabila permasalahan mengenai tingkat partisipasi tidak berjalan dengan baik

Kata Kunci: Etnis, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi, Sosialisai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rakyat merupakan bagian yang memiliki peran menentukan dalam proses pemilihan umum.. Salah satunya bentuk partisipasi politik yang dilakukan adalah dengan menjadi peserta Pilkada, yaitu menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpinnya tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Berdasarkan keikutsertaan mereka tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat kelak. Pada negara demokrasi, semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi maka dianggap semakin baik, jika sebaliknya masyarakat kurang aktif dan acuh maka dianggap belum peka terhadap -masalah kenegaraan. Masih tingginya angka partisipasi politik oleh rakyat, ditunjukkan oleh beberapa masyarakat yang mengikuti tentang masalah politik dan ikut terlibat dalam hal berpolitik. Dan sebaliknya, jika angka partisipasi rendah maka adanya tanda-tanda jika dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara tersebut bisa dibilang kurang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Luber dan Jurdill dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi demokrasi, tujuan pemilu mengacu pada prinsip kebijakan yang demokratis diantaranya mengutamakan kepentingan masyarakat. Tujuan pemilu yang utama sebagai penyalur kedaulatan rakyat. Peran masyarakat di dalam dunia politik bukan suatu hal yang baru, tetapi peran tersebut sudah sejak lama hidup di dalam kehidupan berpolitik sejak bangsa Indonesia merdeka. Namun banyak partisipasi masyarakat yang belum berjalan dengan baik, demokrasi hanya berlaku pada rakyat pribumi, padahal di Indonesia terdapat beragam Etnis, contohnya adalah warga keturunan Tionghoa. Tionghoa adalah Etnis yang berasal dari Tiongkok. Para leluhur rakyat tionghoa pada jaman dulu berimigrasi melalui kegiatan perniagaan. Catatan-catatan yang berasal Tiongkok pun menyatakan bahwa adanya kerajaan kuno yang berada di wilayah nusantara mempunyai keterkaitan dengan dinasti yang memiliki kekuasaan di China/Tiongkok. Faktor ini akhirnya merekatkan system perdagangan dari Tiongkok ke Nusantara ataupun sebaliknya. Seusai Indonesia meraih kemerdekaannya, masyarakat Tionghoa yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia kemudian dikelompokkan sebagai salah satu suku di lingkup nasional Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain itu, adanya pemberlakuan undang-undang dan peraturan baru untuk menghilangkan sikap diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa, maka dibentuklah Kepres No. 19 tahun 2002 yang memutuskan untuk menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Di masa reformasi, contohnya adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini terfokus kepada masyarakat marjinal, masyarakat marjinal merupakan suatu kelompok yang jumlahnya minoritas.

Kebebasan politik Etnis Tionghoa sudah mulai dibuka oleh Pemerintah pada masa Presiden ke 2 yaitu Abdurahman wahid. Gusdur membuka berbagai kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk dapat berkiprah secara budaya, agama, dan bahkan dalam dunia politik. Pada masa pemerintahan Soeharto telah berupaya agar masyarakat Tionghoa bisa lebih bebas dalam mewujudkan eksistensinya sebagai salah satu etnis yang minoritas di Indonesia. Kendati demikian, partisipasi politik etnis Tionghoa masih jauh dari harapan dan banyak yang masih enggan untuk berpartisipasi dalam dunia politik¹

¹ Fiqh Munakahat, “Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa Di Indonesia,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014* 4, no. 1 (2014): 368, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1293/1121>.

**Hitung Suara
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Kota Semarang tahun 2015**

Perolehan Suara Kandidat-Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil
Walikota Semarang Tahun 2015

No	Kandidat	Partai	Suara	% Suara
1	Marmo-Zuber	PKB dan PKS	220.745	31,96
2	Hendi-Ita	PDIP, Nasdem, PD	320.237	46,36
3	Sigit -Agus	Gerindra, PAN, Golkar	149.712	21,68
Total Suara sah			690.694	62,28
Total Suara tidak sah/Golput			418.351	37,72
Pemilih Terdaftar			1.109.045	

Sumber: semarangkota.bps.go.id²

Sesuai tabel diatas pasangan Hendi-Ita berhasil memenangkan suara dengan perolehan suara sebesar 320.237 atau 46,36% dari perolehan total suara

**Hitung Suara
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Kota Semarang tahun 2020**

No	Nama	Jumlah	Dalam persen
1	(01) H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.M. - Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.	716.693	91,6%
2	(02) Kolom kosong	66.071	8,4%

² Sumber: semarangkota.bps.go.id

Dari tabel diatas pasangan Hendra Prihadi-Hevarita Gunaryati Rahayu berhasil memenangkan suara karena melawan kotak kosong, hal ini yang membuat pasangan tersebut otomatis lolos menjadi walikota dan wakil kota Semarang. Masih ditemukan ada masyarakat yang memilih kolom kosong, hal tersebut dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mempunyai pilihan dalam menyampaikan suaranya. Kelurahan Kranggan memiliki beragam umat beragama yang beragam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat kesadaran masyarakat masing-masing, pada hasil pemilihan masyarakat yang memilih kolom kosong ini banyak beberapa dari mereka kurang begitu antusias dalam kegiatan partisipasi politik karena di latar belakang oleh beberapa alasan antara lain hanya ada 1 calon yang maju dengan melawan kotak kosong, itu yang membuat mereka hanya memilih calon tunggal tersebut dan selain itu ditemukan alasan lain dimana para calon pemilih memilih untuk golput daripada ikut serta dalam pemilihan umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pertama yaitu ditulis oleh Regina Singestecia yang berasal dari Universitas Negeri Semarang. Dia menulis penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada langsung di Slawi Kabupaten Tegal pada tahun 2017. Pada Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memakai teori dari Ramlan Surbakti. Ramlan. Surbakti yang mengutip pendapat Samuel P. Huntington dan Joan N. Nelson Penelitian ini mempunyai hasil yaitu partisipasi masyarakat Tionghoa mempengaruhi hasil suara dalam pemilihan kepala daerah di Slawi Kabupaten Tegal. Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah partisipasi Etnis Tionghoa di Kelurahan masing-masing peneliti ditunjukkan dengan beberapa bentuk partisipasi politik, meliputi beberapa kegiatan mengenai pemberian suara serta diskusi politik³

Penelitian sebelumnya yang kedua ditulis oleh Marina Syva Pratiwi yang berasal dari Universitas Lampung. Ia menulis penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Almond yaitu partisipasi konvensional, bentuk partisipasi konvensional meliputi tentang pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk serta bergabung dalam suatu kelompok kepentingan, komunikasi individual yang terjadi antara pejabat politik dan administrative. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai partisipasi politik pada aktivitas Pilkada di Slawi Kabupaten Tegal serta mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat

³ R Singestecia, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Langsung Di Slawi Kabupaten Tegal" (2017): 1-53.

keturunan Tionghoa dalam Pilkada di Slawi Kabupaten Tegal. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu adanya faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa yang terdiri dari kesadaran politik bahwa masyarakat Tionghoa memiliki hak pilih untuk memilih calon pemimpinnya.⁴

Penelitian sebelumnya yang ketiga, ditulis oleh Joni Syahputra yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Ia menulis penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada Aceh Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian ini mempunyai adanya kepentingan terkait politik identitas Etnis Tionghoa pada Pilkada tahun 2017 di Banda Aceh, yang kemudian didorong oleh adanya kesadaran politik serta keadaan masyarakat sekitar, tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak mudah terpengaruh karena adanya kesibukan mereka dalam bekerja.⁵

Penelitian sebelumnya yang keempat, ditulis oleh Nurul Qamariah yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ia menulis penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Di Komplek Cemara Asri Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskripsi kualitatif. Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui angka Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu angka Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa di Kompleks Cemara Asri sebagaimana termasuk dalam kategori Apolitis, diantaranya ada yang bersifat Apatis, Spektator, dan bertindak sebagai pengamat. Mereka banyak bertindak sebagai pengamat tanpa memperhatikan hal yang akan timbul kedepannya.⁶

Penelitian terakhir ditulis oleh Ety Gustin Merdeka Waty yang berasal dari Universitas Hasanuddin. Ia menulis penelitian yang berjudul Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penyusunan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui orientasi atau kecenderungan dalam menentukan pilihan politik dari Etnis Tionghoa pada tiap kontestasi Politik di Kota Makassar. Penelitian ini mempunyai hasil dimana Etnis Tionghoa cenderung bertindak rasional dalam menentukan bakal calon kandidat di setiap kontestasi politik, mereka sangat mengutamakan kemampuan partai politik atau bakal calon yang akan maju memimpin dengan menyongsong program kerjanya.⁷

⁴ Marina Syva, "PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017" 2017 (2016): 1–23.

⁵ Jony Syahputra, "Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada Aceh Tahun 217" 2017 (2019).

⁶ Nurul Qamariah, "PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018" (2018).

⁷ E G M Waty, "Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar," *Universitas Hasanuddin* (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/77628107.pdf>.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum menurut Samuel Huntington terdiri dari 5 indikator, yang mana berbeda dengan penelitian terdahulu, dengan hasil partisipasi Etnis Tionghoa belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang belum merata di seluruh wilayah Kranggan

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis angka partisipasi politik masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kelurahan Kranggan faktor penghambat dalam partisipasi politik masyarakat Tionghoa upaya mengatasi hambatan pada Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi politik

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivism, untuk meneliti saat kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data pendekatannya induktif, kualitatif dan *output* penelitian ditekankan makna pada generalisasi⁸

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi serta tidak menggunakan metode observasi dikarenakan penelitian ini sudah terlewat yaitu di Tahun 2020 Penulis melakukan wawancara terhadap 29 orang informan yang terdiri dari Sekretaris KPU Kota Semarang, Kepala Sub Bagian Pemilu dan Partisipasi Politik, Camat Semarang Tengah, Lurah Kranggan serta 25 warga Tionghoa yang bermukim di Kelurahan Kranggan Adapun analisisnya menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teknik analisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Nelson (1994)), yang mengemukakan bahwa partisipasi politik meliputi 5 dimensi yaitu kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting dan tindak kekerasan⁹ kelima dimensi ini terdiri dari beberapa indikator yang nantinya akan menjawab tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2013).

⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 1990).

3.1 Partisipasi Etnis Tionghoa Di Kelurahan Kranggan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020

1. Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemilihan adalah kegiatan yang berguna untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjelang hari pemilihan dalam sebuah kontestasi Pemilihan Walikota masing-masing Paslon saling berlomba untuk menawarkan program-program yang bisa menarik hati masyarakat dalam menentukan mengenai pilihan politik.

a. Mengetahui pemilu

Secara umum, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, oleh karena itu pemilu dianggap sebagai motor penggerak mekanisme system politik Indonesia.

2. Lobby

Lobby atau lobbying berarti upaya setiap orang atau kelompok dalam menghubungi pimpinan politik dalam pembuatan peraturan dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu hal. Partisipasi politik tidak akan terelisasi dengan baik tanpa adanya hubungan komunikasi yang mendukung. Dalam hal ini yaitu adanya negosiasi serta kampanye politik

a. Upaya untuk melakukan negosiasi dengan kelompok tertentu

Negosiasi adalah komunikasi antara 2 pihak untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, yang jika dilakukan dan diselesaikan dengan baik akan berakhir dengan kondisi paling tidak satu pihak.

3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Berkaitan dengan kegiatan organisasi yang sesuai dengan Teori Partisipasi Politik menurut Samuel Huntington dapat dibagi menjadi beberapa indikator diantaranya

a. Pembentukan Relawan Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum membentuk relawan demokrasi untuk dapat melakukan komunikasi langsung terhadap Etnis Tionghoa yang bermukim di Kelurahan Kranggan, Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, Sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme yaitu tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu. Oleh karna itu untuk meningkatkan angka partisipasi KPU melakukan rekrutmen kepada masyarakat yang mau mendaftar

4. Contacting

Contacting adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara kelompok maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.

a. Berkomunikasi dalam pemilu

Dalam pelaksanaan sosialisasi politik terhadap warga di Kelurahan Kranggan, KPU Kota Semarang ikut menggandeng beberapa pemangku adat atau relawan demokrasi dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat Tionghoa.

b. Mempererat hubungan dengan masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi politik kita otomatis turun langsung di masyarakat serta menjunjung toleransi antar umat beragama dan memahami cara berkomunikasi dalam suatu kelompok masyarakat

5. Tindakan Kekerasan

Tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, seperti huru-hara, kudeta, pembutuhan politik dan pemberontakan. Tingkat keragaman di Kelurahan Kranggan bermacam-macam. Tindakan kekerasan terdiri dari beberapa indikator diantaranya

a. Tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain

Masyarakat Tionghoa sangat menghargai perbedaan, tidak pernah terjadi permasalahan antar warga. Walaupun mayoritas warga Tionghoa di Kelurahan Kranggan tetapi mereka masih mau bergaul satu sama lain dan belum pernah terjadi cek-cok antar warga di Kelurahan tersebut.

b. Ancaman dan Teror

warga Kranggan yang mayoritas berpenduduk Tionghoa tidak mempengaruhi pilihan warga pribumi, apalagi hingga memicu pertikaian antar warga. Mereka tetap berdiri sesuai pilihannya masing-masing

3.2 Penyelesaian Masalah Terhadap Hambatan Yang Dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Melakukan sosialisasi secara lebih merata untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala

3.3 Diskusi Utama Penelitian

Partisipasi Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan merupakan hal yang menentukan kesadaran masyarakat sendiri dalam memilih calon pemimpinnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum membentuk beberapa relawan demokrasi untuk membantu dalam proses sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kelurahan Kranggan

IV. KESIMPULAN

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwasanya, Kesadaran masyarakat Tionghoa masih kurang yaitu enggan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala daerah karena tidak adanya ketertarikan dengan kegiatan politik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai informan didapatkan informasi bahwa masyarakat Tionghoa banyak yang tidak peduli dengan kegiatan pemilihan dan lebih mengutamakan dirinya untuk bekerja, tetapi saat pemilihan calon anggota DPRD angka partisipasi politik meningkat karena adanya calon tersebut yang maju yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa

Faktor yang menghambat partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan adalah belum meratanya sosialisasi politik yang dilakukan KPU Kota Semarang, jumlah warga Tionghoa yang hadir dalam sosialisasi dan mengikuti tahapan kampanye sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi secara lebih merata untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu melaksanakan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah dengan beberapa sampel yang diambil

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan utamanya dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Etnis Tionghoa yang bermukim di Kelurahan Kranggan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu, warga Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Munakahat, Fiqh. “Kebijakan Politik Gus Durterhadap China Tionghoa Di Indonesia.” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014* 4, no. 1 (2014): 368. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1293/1121>.
- Qamariah, Nurul. “PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DI KOMPLEK CEMARA ASRI TAHUN 2018” (2018).
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 1990.
- Semarangkota.bps.go.id*
- Singestecia, R. “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Langsung Di Slawi Kabupaten Tegal” (2017): 1–53.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahputra, Jony. “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada Aceh Tahun 217” 2017 (2019).
- Syva, Marina. “PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017” 2017 (2016): 1–23.
- Waty, E G M. “Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar.” *Universitas Hasanuddin* (2016). <https://core.ac.uk/download/pdf/77628107.pdf>.

